

## Pengembangan Purwarupa Sistem Informasi Pelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi

Muhammad Al Hafidhi<sup>1</sup>, M. Riza Pahlevi B<sup>2</sup>., Khairuldi<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Dinamika Bangsa, Kota Jambi, Indonesia

Email: <sup>1</sup>hafidhi1992@gmail.com, <sup>2</sup>rizapahlevi@unama.ac.id, <sup>3</sup>khairuldi@unama.ac.id

Email Penulis Korespondensi: khairuldi@unama.ac.id

**Abstrak**– Sistem Informasi merupakan salah satu penunjang dalam administrasi kegiatan perkantoran, khususnya di sini dalam kegiatan pelayanan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi. Sebelumnya, peneliti telah membangun dasar-dasar dalam penggunaan sebuah aplikasi seperti akses masuk aplikasi, batasan-batasan apa yang dapat diketahui masing-masing pengguna, CRUD data stakeholder serta CRUD data rekening yang digunakan kantor, sehingga peneliti melihat perlunya pengembangan terhadap aplikasi ini, khususnya terkait pelayanan lelang. Penelitian ini menggunakan waterfall sebagai metode penelitian. Penelitian ini menghasilkan pengembangan aplikasi yang dapat menjadi jembatan data antara Seksi Pelayanan Lelang dengan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Jambi. Dengan pengembangan aplikasi ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi kedua Seksi untuk dapat saling melakukan crosscheck data yang dimiliki masing-masing Seksi. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL dan PHPmyadmin.

**Kata Kunci:** Pengembangan; Pelayanan Lelang; Hukum dan Informasi; PHP; MySQL

**Abstract**– The Information System is one of the supports in the administration of office activities, especially here in auction service activities at the Jambi State Property and Auction Service Office (KPKNL). Previously, researchers had built the basics in using an application such as application login access, what limits each user could know, stakeholder data CRUD and account data CRUD used by the office, so researchers saw the need for development of this application, in particular related to auction services. This study uses the waterfall as a research method. This research resulted in the development of applications that can be a data bridge between the Auction Service Section and the Legal and Information Section at the Jambi KPKNL. With the development of this application, it is hoped that it will make it easier for the two Sections to be able to cross-check the data held by each Section. The application is built using the PHP, MySQL and PHPmyadmin programming languages.

**Keywords:** Development; Auction Service; Law and Information; PHP; MySQL

### 1. PENDAHULUAN

Lelang merupakan salah satu cara manusia dalam melakukan transaksi jual beli. Secara umum, lelang biasanya dilakukan dengan cara para penawar menawar harga barang dari harga terendah sampai dengan harga tertingginya yang kemudian penawar yang menawar harga tertinggilah yang ditetapkan sebagai pemenangnya. Pada saat ini, khususnya di Indonesia, penyelenggara jual beli lelang terdiri dari pihak swasta dan pihak negara. Untuk pihak negara, penyelenggaraan jual beli lelang ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah satu institusi dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, sebagai kantor turunan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah satu tugasnya adalah mengelola penyelenggaraan lelang negara yang berada di wilayah Provinsi Jambi. KPKNL Jambi saat ini beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 17 Kota Jambi. Tugas Pengelolaan Pelayanan Lelang ini sangatlah menantang mengingat besarnya wilayah Provinsi Jambi sehingga banyak satuan kerja (satker) Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki barang, setiap tahunnya ada saja yang wajib dihapus-bukukan dengan cara dilelang oleh KPKNL Jambi. Selain Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ada sebagian lelang yang berasal dari pihak luar Pemerintah seperti dari Perbankan, Perusahaan Swasta, dan juga Perorangan pun ada yang mengajukan lelang barang yang dimilikinya.

Saat ini, peneliti sedang bekerja di KPKNL Jambi sebagai Bendahara Penerimaan. Tugas dari Bendahara Penerimaan ini salah satunya adalah melakukan administrasi terkait Pelayanan Lelang. Untuk memudahkan pekerjaannya, peneliti telah membangun Sistem Informasi Pelayanan Lelang yang diberi nama SIKAP (Sistem Informasi Kapekaenel). Akan tetapi, saat ini SIKAP hanya mengolah data-data terkait penggunaannya saja, seperti Bendahara Penerima, Pejabat Lelang, Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang, dan Atasan Langsung Pejabat Lelang. Inti dari pekerjaan teknis Bendahara Penerimaan adalah pengelolaan uang masuk dan keluar dari pihak selain negara. Khusus Bendahara Penerimaan di KPKNL, pengelolaan uang yang dimaksud adalah yang terkait lelang dan piutang saja. Pada tulisan ini, peneliti fokuskan kepada pengelolaan uang terkait lelang. Banyaknya pekerjaan teknis pengelolaan uang terkait lelang ini membuat Bendahara Penerimaan kesulitan, mengingat Bendahara Penerimaan dalam jabatannya pun tidak disertai dengan asisten yang dapat membantu setiap harinya. Untuk penulisan jurnal ini, peneliti mengangkat masalah khusus pekerjaan teknis pengelolaan uang terkait lelang, yakni pengelolaan Bea Lelang Batal, Bea Permohonan Lelang dan Bea Kutipan Pengganti.

Pengelolaan Bea Lelang Batal, Bea Permohonan Lelang dan Bea Kutipan Pengganti ini memerlukan kerja sama antara Seksi Hukum dan Informasi sebagai pemegang keuangannya dan Seksi Pelayanan Lelang sebagai pemegang data administrasinya. Selama ini kesulitan yang dialami adalah ketika adanya proses rekonsiliasi data yang biasanya dilakukan di setiap akhir bulan membuat para pelaksana rekonsiliasi membutuhkan usaha yang lebih besar, hanya untuk melakukan *crosscheck* data yang dimiliki oleh Bendahara Penerima (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi) dan Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi?”.

Agar dalam penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terarah, Peneliti menetapkan ruang lingkup penelitian meliputi :

1. Penelitian hanya membahas mengenai data rekening koran, data pembayaran Bea Permohonan Lelang, pembayaran Bea Lelang Batal, pembayaran Bea Kutipan Pengganti, dan data stakeholder.
2. Pengembangan purwarupa sistem informasi hanya berdasarkan studi kasus pengelolaan terkait Bea Permohonan Lelang, Bea Lelang Batal dan Bea Kutipan Pengganti yang terjadi pada Bendahara Penerimaan di KPKNL Jambi.
3. Pengembangan purwarupa sistem informasi berbasis internet dan lebih ke arah untuk digunakan pada browser yang bersifat *desktop-view*, bukan *mobile-view*.
4. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, JQuery, Visual Studio Code, Codeigniter 4, dan DBMS MySQL.
5. Permodelan sistem yang digunakan untuk merancang sistem ini adalah *Use Case Diagram* dan *Flowchart Diagram*.

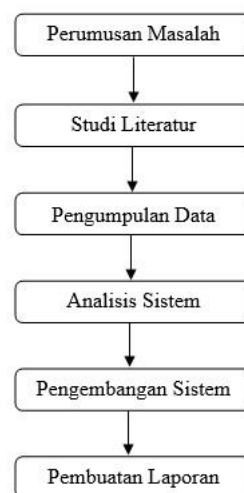
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan purwarupa Sistem Informasi Pelayanan Lelang yang dapat membantu pekerjaan Bendahara Penerimaan KPKNL Jambi, khususnya terkait pengelolaan Bea Lelang Batal, Bea Permohonan Lelang dan Bea Kutipan Pengganti. Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Bagi Bendahara Penerimaan, agar Bendahara Penerimaan KPKNL Jambi mudah dalam melakukan pekerjaannya.
2. Bagi Atasan Langsung Bendahara Penerimaan, agar dapat melakukan pengawasan kepada Bendahara Penerimaan.
3. Bagi Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang dan Pejabat Lelang, agar mudah melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Tahapan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan terarah maka perlu dibuat sebuah kerangka kerja penelitian, adapun kerangka kerja penelitian yang penulis buat dapat dilihat pada bagian di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Penelitian

Adapun uraian dari kerangka kerja diatas, adalah sebagai berikut:

1. Perumusan masalah

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi sebelum membangun fitur administrasi Bea Lelang Batal, Bea Permohonan Lelang, dan Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti di KPKNL Jambi yang akan diterapkan pada aplikasi SIKAP. Dalam administrasi Bea Lelang Batal, Bea Permohonan Lelang, dan Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti ini memerlukan kerja sama dua pihak di dalam kantor KPKNL Jambi. Peneliti melihat selama ini kurangnya kerjasama yang baik antara pemilik rekening koran (Seksi Hukum dan Informasi) dan pemilik uang yang sesungguhnya (Seksi Pelayanan Lelang) dalam melakukan rekonsiliasi data yang dimiliki satu sama lain. Terkadang malah tidak adanya rekonsiliasi, sehingga data yang disampaikan kepada atasan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

## 2. Studi Literatur

Merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dengan mempelajari studi literatur maka dapat mencari ide-ide penelitian, mempertajam ide, mencari metode yang sesuai dengan yang penelitian lakukan. Studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Arsip dan dokumen-dokumen tersebut yang diperoleh dari Pengelolaan Bea Lelang Batal, Bea Pemohonan Lelang dan Bea Kutipan Pangganti pada KPKNL Jambi

## 3. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu proses penerapan metode penelitian pada masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mempelajari teori – teori ataupun jurnal - jurnal yang relevan dari dokumen yang relevan serta mengumpulkan masukan data sehingga penelitian yang berhubungan dengan sistem administrasi Bea Lelang Batal, Bea Permohonan Lelang, dan Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

## 4. Analisis Sistem

Setelah mempelajari apa yang diperlukan dan mengumpulkan data untuk memecahkan masalah yang terjadi pada KPKNL Jambi, peneliti menganalisis permasalahan yang ada, sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengurangi atau mengatasi permasalahan tersebut. Analisis ini dilakukan agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian.

## 5. Pengembangan Sistem

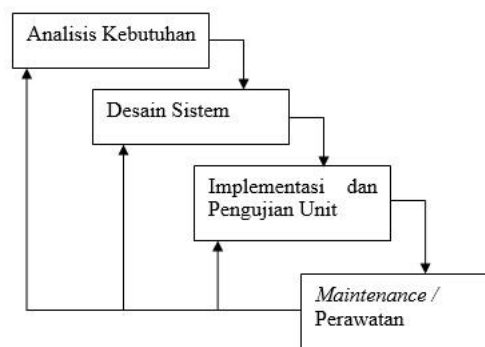
Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan model air terjun (*waterfall*). Data-data dan informasi mengenai kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun dimasukkan ke dalam database.

## 6. Pembuatan Laporan

Pada tahapan ini yaitu proses pembuatan laporan yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan penulis. Tujuan dari tahap ini adalah agar penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi pengembangan penelitian berikutnya.

### 2.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem merupakan bagaimana cara peneliti mengembangkan perangkat lunak yang dilakukan dalam metode pengembangan sistem ini peneliti mengembangkan perangkat lunak menggunakan model *waterfall* (model air terjun). Berikut adalah gambar dari model *waterfall* beserta uraiannya. Dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :



Gambar 2.2 Model *Waterfall*

Berikut merupakan penjelasan tahap-tahap yang dilakukan dalam model *Waterfall* :

## 1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasi kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh *user*. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. Kebutuhan dalam pengembangan ini cukup rumit untuk dianalisis, peneliti perlu bertanya dengan pihak Seksi Pelayanan Lelang terkait apa saja yang diharapkan dengan adanya penambahan fitur administrasi Bea Lelang Batal, Bea Permohonan Lelang, dan Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti ini.

## 2. Desain Sistem

Pada tahap ini desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Tahapan desain atau perancangan sistem ini merupakan proses menterjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk rancangan.

## 3. Implementasi dan Pengujian Unit

Implementasi merupakan tahap pembuatan aplikasi berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem sebelumnya sehingga sistem yang dibuat dapat difungsikan dalam keadaan sebenarnya dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun hasil yang dicapai dari implementasi ini adalah :

- a. Menyelesaikan desain sistem yang telah ada dalam dokumen perancangan yang telah disetujui
- b. Menguji dan mendokumentasikan program atau prosedur dari dokumen perancangan sistem yang telah disetujui
- c. Memastikan bahwa pemakai dapat pengoperasikan sistem yaitu dengan melakukan kegiatan pelatihan kepada pemakai
- d. Mempertimbangkan bahwa sistem memenuhi permintaan pemakai, yaitu dengan menguji secara keseluruhan.
- e. Memastikan bahwa konversi ke sistem yang baru berjalan dengan benar yaitu dengan membuat rencana, mengotrol dan melakukan instalasi sistem secara benar.

## 4. Maintenance/Perawatan

Merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi yang dapat menyebabkan error yang mungkin tidak ditemukan sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum KPKNL Jambi

KPKNL Jambi merupakan kantor turunan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berada di Jl. Dr. Soetomo No. 17 Pasar Jambi, yang salah satu tugasnya adalah mengelola pelayanan lelang yang diselenggarakan negara dan berada di wilayah Provinsi Jambi. KPKNL Jambi memiliki 7 seksi yang akan menjalankan tugas fungsi yang berbeda-beda. Khusus dalam penulisan jurnal ini, hanya ada 2 seksi yang akan berperan, yakni Seksi Hukum dan Informasi dan Seksi Pelayanan Lelang. Dalam penulisan jurnal ini, terkait pelayanan lelang yang akan dibahas adalah pelayanan lelang yang berada dalam pekerjaan teknis Bendahara Penerimaan dan lebih dirinci lagi hanya pekerjaan teknis Bendahara Penerimaan terkait yaitu :

- a. Bea Permohonan Lelang;  
Sebesar Rp150.000 dengan 3 jenis lelang eksekusi yang dikenakan bea permohonan lelang.
- b. Bea Lelang Batal; dan  
Sebesar Rp250.000 untuk lelang dengan kategori barang yang dilelang adalah bukan Milik Negara/Daerah.
- c. Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti.  
Sebesar Rp500.000 per Kutipan Risalah Lelang yang rusak atau hilang.

Terkait pekerjaan teknis Bendahara Penerimaan di atas, pekerjaan tersebut tidak hanya melibatkan Bendahara Penerimaan saja, akan tetapi melibatkan pegawai di seksi lain yang mana pegawai-pegawai yang terlibat akan digambarkan dalam tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3.1 Seksi pada KPKNL Jambi yang terlibat

Seksi Hukum dan Informasi	Seksi Pelayanan Lelang
1. Kepala Seksi Hukum dan Informasi	1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang
2. Bendahara Penerimaan	2. Pelelang (dahulu Pejabat Lelang)
	3. Pelaksana
	4. Honorer

3.2 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Peneliti perlu mengetahui bagaimana proses yang sedang berjalan mengenai KPKNL Jambi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap sistem berjalan dimana analisis sistem berjalan dilakukan untuk memperoleh penguraian dari suatu informasi yang sedang berjalan pada komponennya dengan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan yang diharapkan dapat diusulkan perbaikannya. KPKNL Jambi khususnya terkait pekerjaan teknis pelayanan lelang pada Bendahara Penerimaan, yaitu Bea Permohonan Lelang, Bea Lelang Batal dan Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti, masih menggunakan sistem manual atau konvensional menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menyimpan datanya, yang mana cukup menyulitkan untuk diakses banyak pengguna karena hanya disimpan pada satu komputer atau laptop saja, sedangkan terkait data-data yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan ini, dibutuhkan oleh banyak pengguna, terutama oleh Atasan Bendahara Penerimaan, Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Pejabat Lelang, dan Pelaksana atau Honorer pada Seksi Pelayanan Lelang.

Kemudian peneliti yang juga merupakan Bendahara Penerimaan di KPKNL Jambi, membuat terobosan baru yakni membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang diberi nama SIKAP (Sistem Informasi Kapekaenel) dan telah tayang secara online pada alamat url [sikap.hafidhi.com](http://sikap.hafidhi.com), akan tetapi pada saat penulisan jurnal ini dilakukan, aplikasi SIKAP saat itu hanya mengakomodir terkait CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) data-data pengguna, data-data *stakeholder*, data atribut rekening koran yang berada pada penguasaan Seksi Hukum dan Informasi, dan algoritma akses pengguna terhadap aplikasi (*login dan logout*) saja, sehingga belum ada pekerjaan teknis pelayanan lelang di dalamnya. Berikut di bawah ini adalah gambar fitur-fitur aplikasi SIKAP beserta pengguna fitur sebelum dilakukan pengembangan :

Sistem yang sedang berjalan			
	Administrator	Seksi Hukum dan Informasi	Seksi Pelayanan Lelang
Proses	Login	Login	Login
	CRUD Pegawai	CRUD Atribut Rekening Koran	CRUD Stakeholder
	CRUD Organisasi	CRUD Stakeholder	
	Logout	Logout	Logout

Gambar 3.1 Fitur-fitur Sebelum Dilakukan Pengembangan

Berikut adalah penjelasan dari fitur-fitur pada Gambar 3.1, yakni :

1. *Login dan Logout*;

Fitur yang menurut peneliti wajib ada pada setiap pengguna, untuk mengidentifikasi dan verifikasi akses aplikasi semua pengguna.

2. CRUD Organisasi;

Fitur yang dimiliki oleh *administrator*, berfungsi untuk CRUD data KPKNL Jambi seperti alamat, nomor telepon dan lain sebagainya.

3. CRUD Pegawai;

Fitur yang dimiliki oleh *administrator*, berfungsi untuk CRUD data pegawai (dalam hal ini pengguna) seperti nama, nip, nomor telepon, posisi pegawai berada di seksi mana, dan lain sebagainya.

4. CRUD Atribut Rekening Koran; dan

Fitur yang dimiliki oleh Seksi Hukum dan Informasi, berfungsi untuk CRUD data atribut rekening koran yang dalam penguasaan KPKNL, khususnya data atribut rekening lelang seperti nomor rekening, saldo awal, tanggal saldo awal, nama bank, dan lain sebagainya.

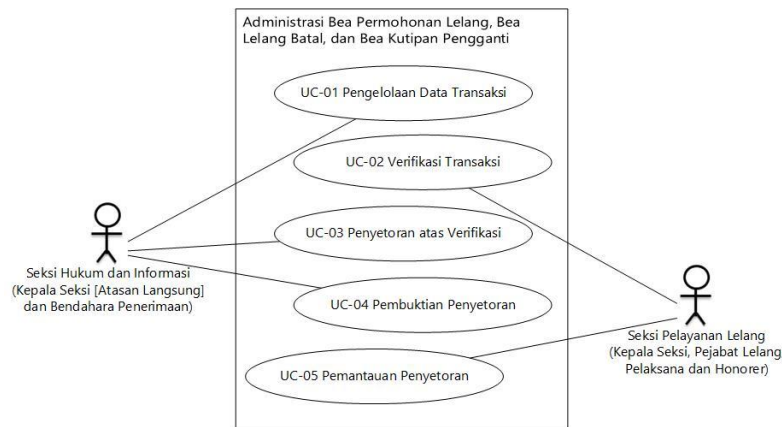
5. CRUD Stakeholder.

Fitur yang dimiliki oleh Seksi Hukum dan Informasi serta Seksi Pelayanan Lelang, berfungsi untuk CRUD data stakeholder yang berperan sebagai penjual dan pemenang lelang dengan isinya seperti nama stakeholder, identitas stakeholder, dan lain sebagainya.

Melihat celah ini, peneliti berencana untuk mengatasi masalah dengan menambahkan fitur pekerjaan teknis pelayanan lelang ke dalam aplikasi SIKAP, mengingat aplikasi SIKAP ini dibangun dengan basis website, tentunya pengolahan data akan lebih efektif dan pengguna yang mengakses data tersebut dapat berada di mana dan kapan saja. Khusus dalam penelitian ini, pengembangan fitur yang ditambahkan hanya terkait administrasi Bea Permohonan Lelang, Bea Lelang Batal dan Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti.

3.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram disini yaitu menjelaskan dalam bentuk gambar mengenai cara kerja program yang dibangun dilihat dari sudut pandang objek sebagai pengguna sistem dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor atau sebagai pengguna program yang dibangun. Use Case Diagram seksi Hukum dan Informasi dan seksi Pelayanan Lelang memperlihatkan gambaran-gambaran kegiatan yang yang dapat dilakukan oleh seksi Hukum dan Informasi dan seksi Pelayanan Lelang terhadap aplikasi SIKAP yang akan dikembangkan. Bentuk Use Case Diagram dirancang :



Gambar 3.2 Use Case Diagram seksi Hukum dan Informasi dan seksi Pelayanan Lelang

Dari gambar 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa secara garis besar terdapat 2 (dua) pengguna yang memiliki tugas-tugas yakni :

1. Bagi Seksi Hukum dan Informasi; dan
  - a) Mengelola data transaksi rekening koran;
  - b) Melakukan penyetoran ke kas negara atas verifikasi transaksi sesuai dengan jenis transaksinya; dan
  - c) Melakukan pembuktian atas penyetoran yang dilakukan.
2. Bagi Seksi Pelayanan Lelang.
  - a) Melakukan verifikasi transaksi rekening koran; dan
  - b) Melakukan pemantauan atas penyetoran yang dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi.

3.3 Rancangan Tabel Basis Data

Struktur data yang digunakan dalam rancangan sistem yang akan dibangun ini dapat dilihat pada tabel yang tersedia di bawah ini.

3.4.1 Tabel hi\_llg\_rek\_koran

Pada rancangan tabel hi\_llg\_rek\_koran ini, yang berwenang atas tabel ini adalah seksi Hukum dan Informasi. Adapun yang menjadi primary key dalam tabel ini adalah id. Berikut ini merupakan rancangan tabel :

Tabel 3.2 Rancangan Tabel hi\_llg\_rek\_koran

No	Field Name	Type	Length	Keterangan
1	datetime	Int	11	Tanggal (dalam bentuk <i>unix timestamp</i> )
2	remark	Text	-	Keterangan transaksi rekening koran
3	Debit	Decimal	30,2	Transaksi uang keluar

4	kredit	<i>Decimal</i>	30,2	Transaksi uang masuk
5	description	<i>Text</i>	-	Keterangan tambahan untuk transaksi dimaksud
6	is_clear	<i>Int</i>	1	Menyatakan transaksi dimaksud telah diverifikasi
7	is_stj	<i>Int</i>	1	Menyatakan transaksi dimaksud masuk ke dalam akun setoran tidak jelas
8	bank_account_id	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi dimaksud masuk ke dalam rekening koran yang mana
9	hi_llg_tutup_buku_id	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud telah dilakukan tutup buku
10	employee_id	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud dimasukkan oleh siapa
11	org_lvl_3_id	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud milik KPKNL mana
12	created_at	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud dibuat pada tanggal berapa (dalam bentuk <i>unix timestamp</i> )
13	updated_at	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud diubah pada tanggal berapa (dalam bentuk <i>unix timestamp</i> )

**3.4.2 Tabel llg\_benma\_biaya\_langsung**

Pada rancangan tabel llg\_benma\_biaya\_langsung ini, yang berwenang atas tabel ini adalah Seksi Pelayanan Lelang. Adapun yang menjadi primary key dalam tabel ini adalah id. Berikut ini merupakan rancangan tabelnya :

Tabel 3.3 Rancangan Tabel llg\_benma\_biaya\_langsung

No	Field Name	Type	Length	Keterangan
1	penjual_id	<i>Bigint</i>	20	Id penjual (untuk bea permohonan lelang dan bea lelang batal)
2	pemenang_id	<i>Bigint</i>	20	Id pemenang (untuk bea kutipan risalah pengganti)
3	keterangan	<i>Text</i>	-	Keterangan tambahan atas transaksi yang diverifikasi
4	kredit_hi_llg_rek_koran_id	<i>Bigint</i>	20	Sebagai bukti transaksi masuk ke rekening
5	file_bukti	<i>Varchar</i>	100	Sebagai bukti tambahan transaksi masuk dalam bentuk .pdf
6	__jenis_setoran	<i>Int</i>	2	Sebagai penanda transaksi masuk ini masuk ke dalam Bea Permohonan Lelang, Bea Lelang Batal atau Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti
7	hi_llg_biaya_langsung_id	<i>Bigint</i>	20	Sebagai jembatan dengan penyetoran yang dilakukan Seksi Hukum dan Informasi
8	employee_id	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud dimasukkan oleh siapa
9	org_lvl_3_id	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud milik KPKNL mana
10	created_at	<i>Int</i>	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud dibuat pada tanggal berapa (dalam bentuk <i>unix timestamp</i> )

11	updated_at	Int	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud diubah pada tanggal berapa (dalam bentuk <i>unix timestamp</i> )
----	------------	-----	----	---

3.4.3 Tabel Ilg\_benma\_biaya\_langsung

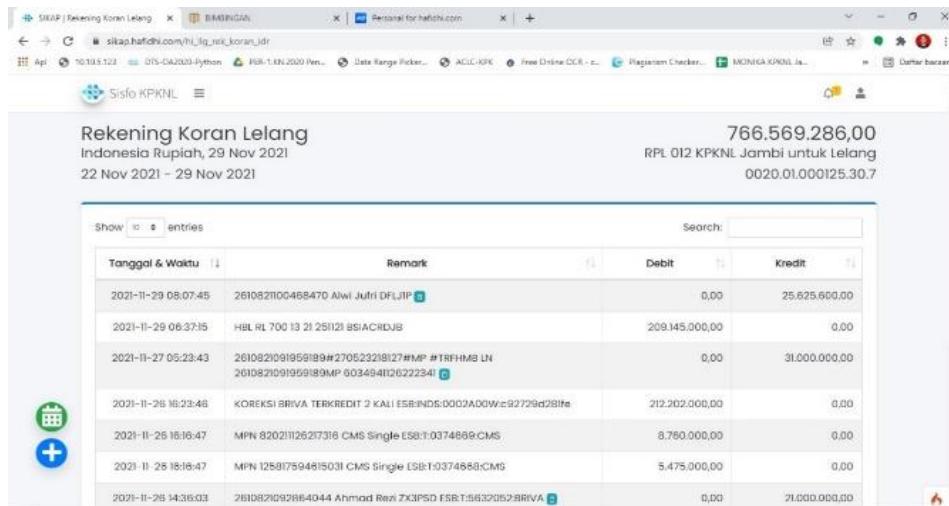
Pada rancangan tabel hi\_llg\_biaya\_langsung ini, yang berwenang atas tabel ini adalah Seksi Hukum dan Informasi. Adapun yang menjadi primary key dalam tabel ini adalah id. Berikut ini merupakan rancangan tabel :

Tabel 3.4 Rancangan Tabel hi\_llg\_biaya\_langsung

No	Field Name	Type	Length	Keterangan
1	kode_setoran	Varchar	20	Sebagai penanda sebelum penyetoran dilakukan
2	kode_billing	Bigint	20	Sebagai penanda setelah penyetoran dilakukan
3	debit_hi_llg_rek_koran_id	Bigint	20	Sebagai bukti penyetoran yang ada pada rekening koran
4	file_bukti	Varchar	100	Sebagai bukti tambahan penyetoran dalam bentuk .pdf
5	__jenis_setoran	Int	2	Sebagai penanda transaksi keluar ini masuk ke dalam Bea Permohonan Lelang, Bea Lelang Batal atau Bea Kutipan Risalah Lelang Pengganti
8	employee_id	Int	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud dimasukkan oleh siapa
9	org_lvl_3_id	Int	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud milik KPKNL mana
10	created_at	Int	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud dibuat pada tanggal berapa (dalam bentuk <i>unix timestamp</i> )
11	updated_at	Int	11	Menyatakan transaksi yang dimaksud diubah pada tanggal berapa (dalam bentuk <i>unix timestamp</i> )

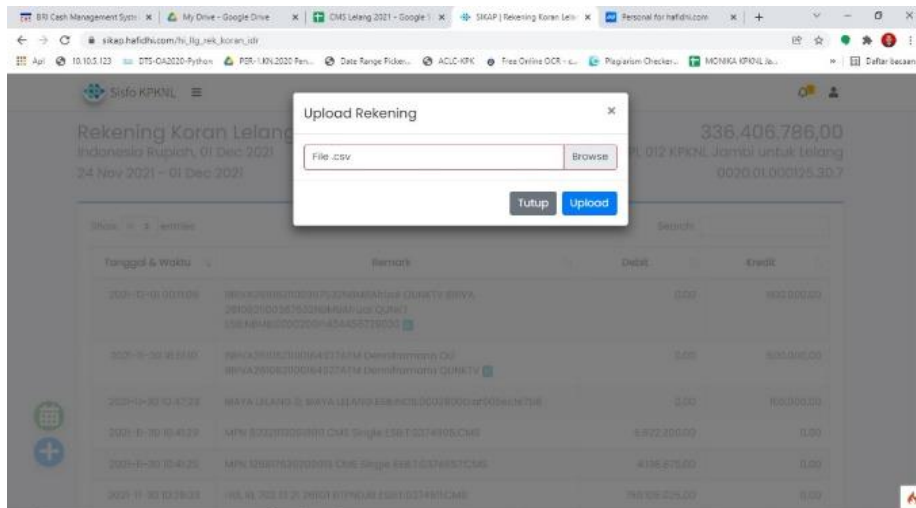
3.4 Implementasi

Berikut adalah beberapa tangkapan layar dari implementasi pembahasan di atas yang akan digunakan oleh 2 jenis pengguna, yakni pengguna dari seksi Hukum dan Informasi dan seksi Pelayanan Lelang.

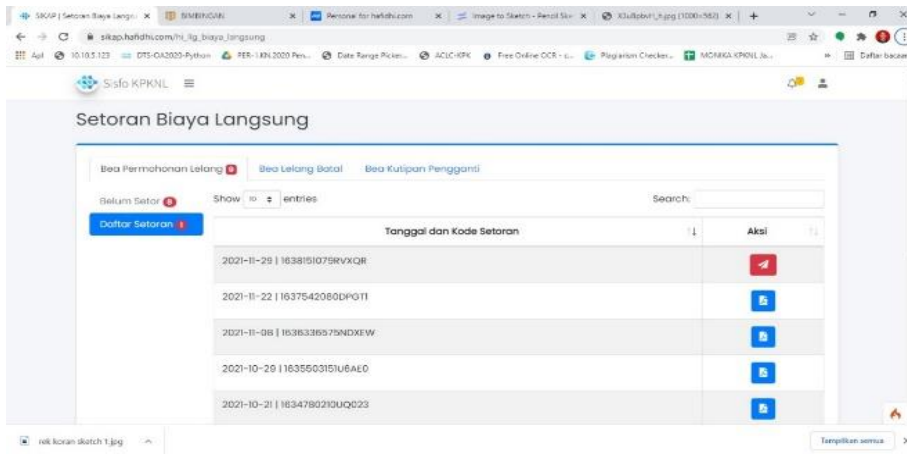


Gambar 3.2 Halaman Rekening Koran – Pengguna Seksi Hukum dan Informasi

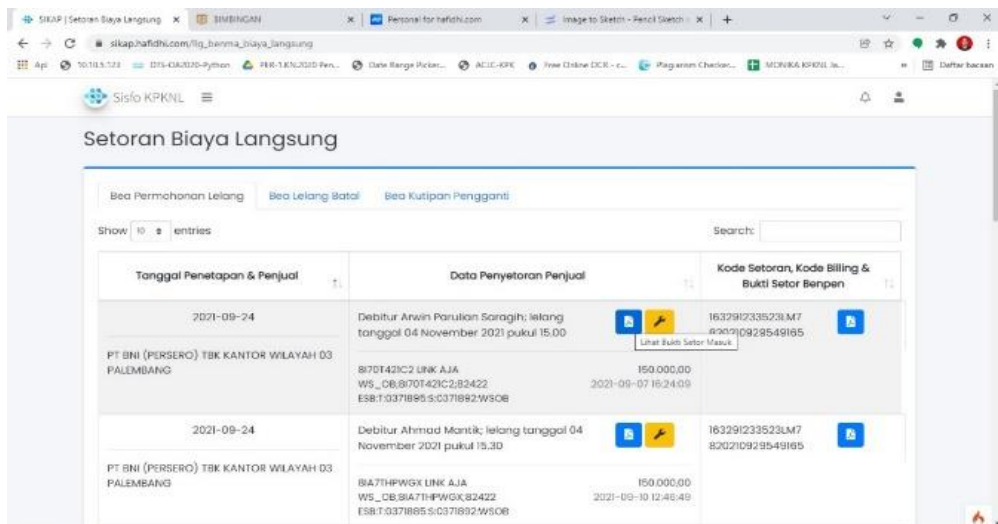




Gambar 3.3 Halaman Rekening Koran – Pengguna Seksi Hukum dan Informasi – Upload Dokumen .Csv



Gambar 3.4 Halaman Biaya Langsung – Pengguna Seksi Hukum dan Informasi



Gambar 3.5 Halaman Biaya Langsung – Pengguna Seksi Pelayanan Lelang

## 4. KESIMPULAN

Pengembangan Purwarupa Sistem Informasi Pelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi telah diuraikan secara lengkap pada pembahasan sebelumnya, berdasarkan pembahasan tersebut peneliti mengambil beberapa kesimpulan, antara lain : CRUD data Transaksi Rekening Koran (Tanggal, Deskripsi, Debit, Kredit, dll), CRUD penetapan Transaksi Masuk sesuai Transaksi Masuk pada Rekening Koran (Tanggal Penetapan, Stakeholder, Tanggal Penyetoran Ke Rekening, Nominal Transaksi, Keterangan Penetapan, dll.), CRUD pembuktian Penyetoran Ke Kas Negara sesuai Transaksi Keluar pada Rekening Koran (Tanggal Pembuktian, Tanggal Penyetoran Ke Kas Negara, Nominal Penyetoran Ke Kas Negara, Kode Billing Penyetoran, dll.)

Penulisan Jurnal ini menghasilkan sebuah pengembangan purwarupa sistem informasi pelayanan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi yang diharapkan dapat mempermudah melakukan *crosscheck* data antar seksi, yakni Seksi Hukum dan Informasi dan Seksi Pelayanan Lelang; dan Pada penulisan ini, peneliti mengimplementasikan purwarupa sistem informasi pelayanan lelang ini dengan berbasis internet, bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL, serta menggunakan alat bantu aplikasi Visual Studio Code untuk mempermudah pengembangan sistem informasi.

## REFERENCES

- [1] Menteri Keuangan Republik Indonesia. "Petunjuk Pelaksanaan Lelang". Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016.
- [2] Amalina, Sabika, et al. "Rancangan Purwarupa Aplikasi Unibook Menggunakan Metode Pendekatan Design Thinking". Sarjana Informatika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- [3] Yunaeti Anggraeni, Elisabet dan Irviani, Rita. Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, pp. 1-12, 2017.
- [4] Constantianus, Frederick dan Renaldy Suteja, Bernard. "Analisa dan Desain Sistem Bimbingan Jurnal Berbasis Web". Diploma III Teknologi Informasi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2005.
- [5] Kadir, Abdul. Dasar Pemrograman Web Dinamis menggunakan PHP. Yogyakarta: Andi, pp. 2, 2008.
- [6] Sultan Arif, Muhammad. "Pembuatan Website Toko Online Oristuff menggunakan framework CodeIgniter dan MySQL". Sarjana Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2021.
- [7] Septian Anarkhy, Geraldly. "Pembuatan Aplikasi Web Anarchy Games menggunakan PHP, CodeIgniter, CSS, jQuery, dan Database MySQL". Sarjana Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2021.
- [8] Sprymedia Ltd. "Datatables". Internet: [datatables.net](https://datatables.net), 2021, 06 November 2021.
- [9] Monte, Limon. "Sweetalert 2". Internet: [sweetalert2.github.io](https://github.com/sweetalert2/sweetalert2), 05 November 2021, 06 November 2021.
- [10] Raharjo, Budi. Belajar Otodidak MySQL. Bandung: Informatika, pp. 1-16, 2015.
- [11] A.S, Rosa dan Shalahuddin, M. Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika, pp. 1-287, 2016.
- [12] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan". Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018.
- [13] Sekretaris Negara Republik Indonesia. "Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002.
- [14] Sekretaris Negara Republik Indonesia. "Pelayanan Publik". Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009.
- [15] Rotuahta Saragih, Richy. "Pemrograman dan Bahasa Pemrograman". Sarjana Teknologi Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mikroskil, Medan, 2018.
- [16] Andriansah, et al. "Aplikasi Sistem Informasi Pelelangan (SIELANG)". Sarjana Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, 2021.
- [17] Indra Lesmana, Edwin, et al. "Sistem Informasi Lelang Online Kendaraan Salvage Berbasis Web Dengan Fitur SMS Gateway pada Balai Lelang Astria Palembang". Sarjana Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Multi Data Palembang, Palembang, 2013.